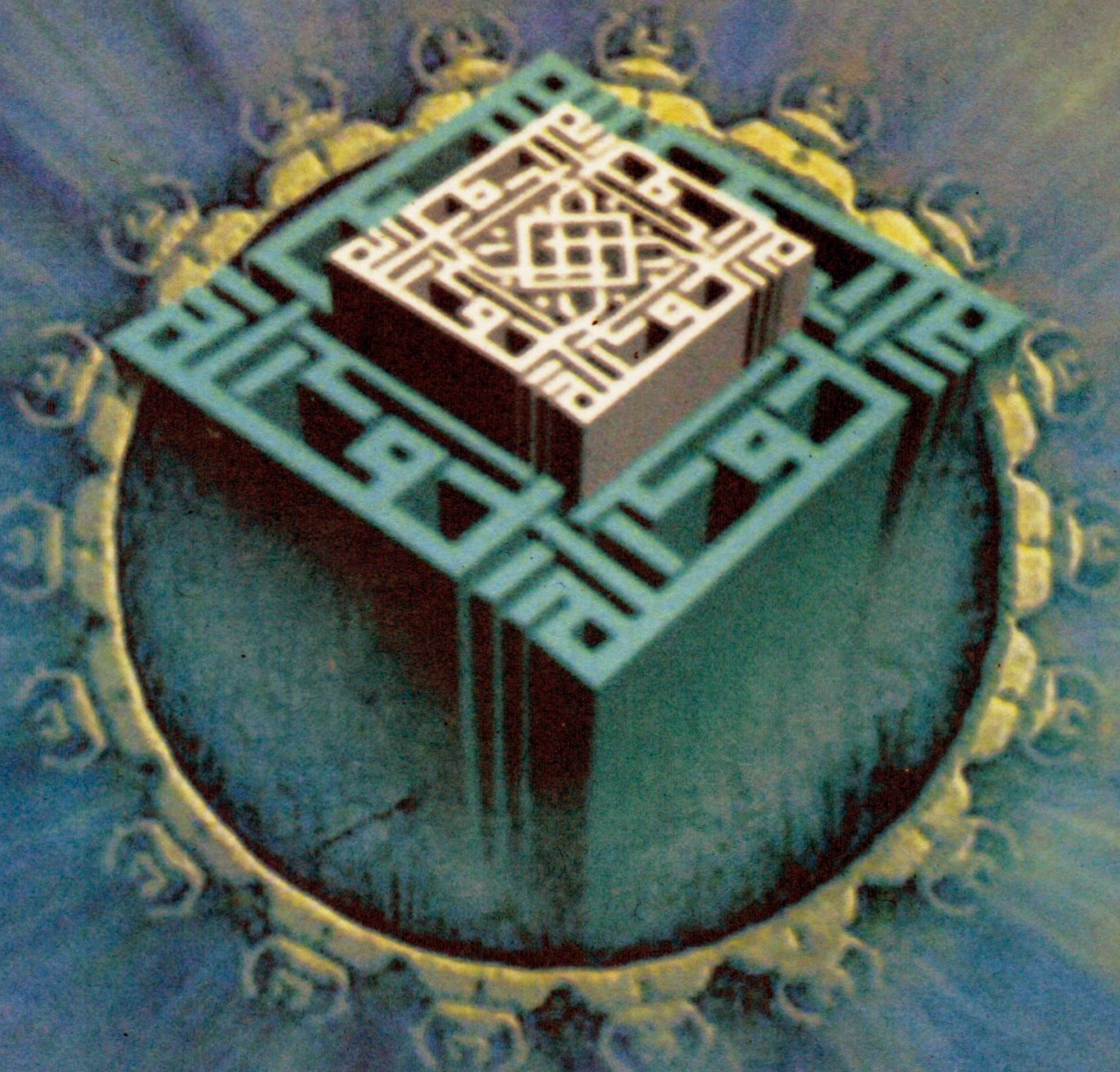


ISSN : 1412 - 2715

EKSPOSE

JURNAL HUKUM DAN PENDIDIKAN

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT



PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
P3M STAIN WATAMPONE

EDISI : VOL. XXII PERIODE JANUARI - JUNI 2013

JURNAL EKSPOSE

VOL. XXII

NO. 1

HAL. 1-148

WATAMPONE 2013

ISSN : 1412 - 1715

EKSPOSE

Jurnal Hukum dan Pendidikan

Media Informasi dan Komunikasi Pengabdian pada Masyarakat

Edisi : Vol. XXII Periode Januari – Juni 2013

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. H. Syarifuddin Latif, M.HI

REDAKTUR

Drs. Husaini, M.Si

Drs. Sulaeman Rafi

PENYUNTING/ EDITOR

Prof. Dr. H. Haddise, M.Ag

Dr. A. Nuzul, SH.,M.Hum

Abd. Rasyid R, S.Pd.,M.Pd

DESAIN GRAFIK

Syafruddin, S.Ag

Khaeruddin Kiramang, S.Ag.,SS.,MIM

Wahyudi Hasyim, A.Md.

DESAIN GRAFIK

Wahyudi Hasyim, A. Md

SEKRETARIAT

Husain Rafi, S.Sos.,M.Si

Dra. Hj. St. Bunatang, M.Si

Ismail Keri, S.Ag

Abd, Hafid, S.Ag.,M.Si

A. Ashrullah, S.EI

Zakia, S.Pd

PENERBIT

Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M)

STAIN Watampone

ALAMAT REDAKSI

Kantor P3M STAIN Watampone

Jl. Hos. Cokroaminoto Watampone. Telp. 0481-21395 Fax. 0481-23928

Redaksi mengundang para pakar, sarjana muslim untuk menulis secara bebas dan kreatif sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas. Redaksi berhak mengedit naskah yang masuk tanpa merubah maksud dan isinya.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL EKSPOSE

1. Artikel yang dimuat meliputi : hasil penelitian, gagasan konseptual, review buku baru/ studi naskah dalam bidang pendidikan dan hukum.
2. Panjang artikel antara 6 s.d. 15 halaman kuarto, spasi 1,5. Naskah belum pernah dipublikasikan, menggunakan *Microsof Word*, Huruf *Times New Roman*, *Font Size* 12.
3. Artikel ditulis dalam bentuk esei. Artikel yang berbahasa Indonesia harus menggunakan abstrak yang berbahasa asing, dan berbahasa asing harus menggunakan abstrak bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jumlah kata pada **abstrak** : 60-90 kata. **Kata Kunci** : 3-8 kata, menggunakan **Judul** dan **subbagian**. Penulisan Subbagian dan seterusnya dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, tidak menggunakan angka dan huruf.

Contoh :

PERINGKAT I; HURUF KAPITAL BOLD, RATA TEPI KIRI

Peringkat 2; Huruf Kapital Awal Kata, Bold, Rata Tepi Kiri

*Peringkat 3; Huruf Kapital Awal Kata, Italic Bold, Rata
Tepi Kiri*

4. Sumber rujukan menggunakan catatan kaki.
Contoh :
Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1979), h. 8.
5. Daftar Pustaka ditulis secara alfabetis (A-Z), sesuai dengan rujukan yang dipilih dengan teknik penulisan seperti contoh dibawah ini :
Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1989.
Prama, Gede, *Percaya Cinta Percaya Keajaiban*, Jakarta : Gramedia, 2012.
6. Daftar Pustaka minimal 7 sumber kutipan.
7. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.
8. Artikel disetorkan dalam bentuk CD dan satu rangkap dalam bentuk Teks

EKSPOSE

Jurnal Hukum dan Pendidikan

DAFTAR ISI

EKSISTENSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

DAN PERMASALAHAN HUKUM KONTEMPORER

H. Haddise.....1- 12

PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PADA MADRASAH DI KOTA WATAMPONE

H. Abdullah K.....13-33

PROBLEMATIKA KOMPETENSI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA PERADILAN AGAMA DAN SOLUSINYA

Abdulahanaa.....34-48

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN BONE *(Studi Terhadap Usaha Kecil Pada Wisata Kuliner "Pantai Kering" Kota Watampone)*

Abd. Rasyid R.....49-63

PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) WATAMPONE

Syamsuriadi.....64-79

EFEKTIVITAS *STUCTURED LEARNING APROACH* (SLA) DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN *PEER HELPING* SISWA SMP Sinthian Susan/ Syahril.....80-93

RAGAM BAHASA BAKU DALAM BAHASA INDONESIA

Nirwana Rasyid.....94-105

PANDANGAN ISLAM TERHADAP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN

Syamsidar.....106-117

STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DALAM PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN & LINGKUNGAN HIDUP (PKLH) DI MADRASAH

Suriani Nur.....118-135

REFORMULASI METODOLOGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB MELALUI DESAIN PENDEKATAN METODE *SILENT WAY/GURU DIAM* (*Upaya Peningkatan Kualitas Mahasiswa*)

Maria Ulfah Syarif.....136-148

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN BONE
(Studi Terhadap Usaha Kecil Pada Wisata Kuliner "Pantai Kering"
Kota Watampone).

Oleh: Abd. Rasyid R., S.Pd., M.Pd.

ABSTRAK

This study aimed to describe economic empowerment on small busines at culinary tourism area "Pantai Kering" in Watampone. The study aims to determine: (1) the characteristics of micro and small enterprises in culinary tourism "Pantai Kering" Bone regency, (2) the problems faced by micro-enterprises to develop their business in culinary tourism " Pantai Kering" Regency Bone (3) empowering micro patterns in culinary tourism "Pantai Kering" of Bone.

This type of research is survey research. The results show that: (1) The problems of small business in culinary area "Pantai Kering" that is classic and fundamental is difficulty in raising business capital, raw material price inflation and illegal charges and retributions that aggravate their business, (2) Empowerment pattern that can be done to overcome the problems faced by small businesses in Culinary Tourism area "Pantai Kering" is providence of well laid locations so as to create comfortable and entertaining family tourism place, education and training needs to be done to improve human resources and quality of the product, and capital aid program that is easy and inexpensive.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Ekonomi, Usaha Kecil

LATAR BELAKANG MASALAH

Saat terjadi krisis moneter tahun 1997 kemudian berimplikasi menjadi krisis ekonomi, sebagian besar pelaku usaha, baik menengah maupun besar terkena imbasnya. Di saat para pelaku usaha tersebut bersusah payah mempertahankan usahanya dari kebangkrutan, justru para pelaku usaha mikro dan usaha kecil tetap tenang dan tidak terpengaruh adanya gejolak moneter dan ekonomi di negeri ini. Lebih jauh lagi, usaha mikro dan usaha kecil telah berperan sebagai *buffer* dan katup pengaman (*savety valve*) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan alternatif lapangan pekerjaan bagi para pekerja sektor formal yang terkena dampak krisis.¹

¹ Lihat Tim peneliti SMERU, *Buku 1: Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997-2003* (Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2003), h. 1

Kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh usaha mikro dan kecil tersebut, kemudian menjadikan keberadaan sektor ini sangat penting dalam perekonomian bangsa, karena *pertama*, usaha mikro dan kecil memiliki kinerja cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, keberadaan sektor ini sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga, sektor usaha kecil memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.² Bahkan Kuncoro juga menyebutkan bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.³

Terkait dengan keunggulan usaha mikro dan kecil tersebut, menurut data BPS Tahun 2011, jumlah usaha kecil Jumlah UKM mencapai sekitar 52 juta, atau menurut KADIN Indonesia, jumlah sektor ini mencapai 98,90%, dengan kontribusi menyerap tenaga kerja sebesar 90,9 juta orang atau 97,15 %, kontribusinya terhadap PDB sebesar 2.069,4 triliun atau 55,6%, nilai investasi yang cukup signifikan 640,4 triliun atau 52,9 %, dan penciptaan devisa sebesar 183,8 triliun atau 20,2 %.⁴

Potensi signifikan yang dimiliki oleh usaha mikro dan kecil tersebut menjadikan keniscayaan akan pemberdayaan sektor ini di daerah seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bone. Menurut Dinas Perdagangan Kabupaten Bone bahwa jumlah usaha mikro dan kecil telah mencapai ribuan dengan persentase 99 % dan menunjukkan peningkatan tahun demi tahun.

Program pemberdayaan dan pembinaan sektor usaha ini, telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone, dengan memberikan ruang gerak para pelaku usaha tersebut untuk mengembangkan usahanya di tempat khusus dan strategis, seperti pada wisata kuliner "pantai kering" di jantung kota Watampone.

Hal ini menjadi dasar pemikiran, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait pemberdayaan usaha mikro dan kecil, karena untuk menggali informasi lebih jauh karakteristik sektor usaha kecil dan strategi dan pola pemberdayaan usaha kecil di Kabupaten Bone.

² Lihat Berry, A., E. Rodriguez, dan H. Sandeem, "*Small and Medium Enterprises Dynamics in Indonesia*", Bulletin of Indonesian Economic Studies, 2001

³ Kuncoro, Mudrajat, Otonomi dan Pembangunan Daerah (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 67

⁴ Kadin Indonesia, *Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi* (Jakarta: Kadin Indonesia, 2009), h. 2-3

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan dihadapi usaha mikro mengembangkan usahanya di wisata kuliner "Pantai Kering" Kabupaten Bone?
2. Bagaimana pola pemberdayaan usaha mikro di wisata kuliner "Pantai Kering" Kabupaten Bone?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Gunawan, konsepsi pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.⁵

Secara tersirat pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, partisipasi dengan titik fokusnya pada lokalitas, sebab masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui issue-issue lokal, seperti yang dinyatakan oleh Anthony Bebbington, yaitu:

*Empowerment is a process through which those excluded are able to participate more fully in decisions about forms of growth, strategies of development, and distribution of their product.*⁶

Beberapa pandangan tentang pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut :

- a. Struktural, pemberdayaan merupakan upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang operesif.
- b. Pluralis, pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu 'rule of the game' tertentu.

⁵ Lihat Gunawan Sumodiningrat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia, 1998), h. 35

⁶ Anthony Bebbington, *Development is more than just growth, Development Outreach*, Volume two, number three, Summer 2000

- c. Elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliansi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis.
- d. Post-Strukturalis, pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial.⁷

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*peoplecentred, participatory, empowering, and sustainable*".⁸

Konsep Usaha Kecil dan Menengah

Kriteria usaha kecil di Indonesia berbeda-beda tergantung pada fokus permasalahan yang dituju dan di instansi yang berkaitan dengan sektor ini. Badan pusat Statistik (BPS) secara konsisten sejak tahun 1974 menggunakan pedoman jumlah tenaga kerja dalam mendefinisikan usaha kecil bilamana suatu usaha menggunakan jumlah tenaga kerja antara 5 dan 19 orang dikategorikan sebagai Usaha Kecil.⁹

Departemen perindustrian, pada tahun 1990, mengemukakan kriteria usaha kecil dari sisi finansial, yaitu usaha yang nilai asetnya (tidak termasuk rumah dan tanah), dibawah Rp. 600.000.000. sementara menurut Kamar dagang dan industri (KADIN), sektor usaha yang tergolong kecil kalau memiliki modal aktif di bawah Rp. 150.000.000. dengan *turn over* di bawah Rp. 600.000.000 per tahun, kecuali untuk sektor konstruksi dengan batasan memiliki modal aktif dibawah Rp. 250.000.000. dengan *turn over* dibawah Rp. 1 milyar per tahun.¹⁰

Dengan adanya Undang-undang tentang Usaha Kecil, maka paling tidak ada acuan formal tentang pengertian usaha kecil. Di dalam UU No. 9 / 1995 tentang Usaha Kecil disebutkan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih/hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur didalam Undang-undang ini. Untuk lebih jelas dengan menggunakan angka nilai *asset neto*, dijelaskan dalam UU No. 9 / 1995 ditetapkan bahwa Usaha kecil adalah suatu unit usaha yang memiliki nilai *asset neto* (tidak termasuk

⁷ Jim Ife, *Community Developmen: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 59

⁸ J. K. Chambers, *Sociolinguistic Theory: Linguistic Variation and Its Social Significance*, 2nd edition (Malden, MA: Blackwell Publishers, 2003), h. 24

⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia. www.bps.go.id.

¹⁰ Suryana. *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses* (Jakarta: Salemba, 2003), h. 76

tanah dan bangunan) yang tidak melebihi Rp. 200 juta, atau penjualan per tahun tidak lebih besar dari 1 miliar.¹¹

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan jenis data yang akan diamati, maka penelitian ini termasuk penelitian survei yang mempelajari data dari sampel, sehingga ditemukan kejadian-kejadian yang relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Wisata Kuliner "Pantai Kering" Kota Watampone Kabupaten Bone.

Sumber Data

Data penelitian ini terdiri dari dua sumber sebagai berikut:

1. Data primer, bersumber dari para pelaku usaha kecil pada wisata kuliner "Pantai Kering"
2. Data sekunder, bersumber dari instansi terkait yang sesuai dengan fokus penelitian.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah seluruh pelaku usaha kecil pada Wisata Kuliner "Pantai Kering" Kota Watampone yang berjumlah 97, dalam penelitian hanya ditetapkan sampel sebanyak 30 yang terdiri berbagai macam pelaku usaha, yaitu usaha martabak, sarabba dan ubi goreng, aneka macam masakan, dan roti bakar

Fokus Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah karakteristik, problematika dan pola pemberdayaan usaha kecil pada Wisata Kuliner "Pantai Kering" Kota Watampone Kabupaten Bone.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan secara langsung, yaitu memperoleh data dari perilaku responden. Cara ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati secara langsung perilaku masyarakat serta kejadian sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian.

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Bab III Pasal 5

- b. Pedoman wawancara, teknik ini dilakukan dengan responden *face to face* untuk menggali informasi yang tidak nampak atau memperjelas fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode wawancara.
- c. Kuesioner atau angket, yaitu berupa lembaran pertanyaan yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dari responden tentang kontribusi dana infak haji dan pemanfaatannya terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bone, khususnya pembangunan kegiatan keagamaan.
- d. Dokumentasi, yaitu mencari dan mencatat data secara singkat, jelas dan sistematis yang diperoleh dari pihak instansi pemerintah yang terkait

Teknik Analisis Data

Berdasarkan dengan jenis penelitian, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang pengumpulan datanya dilakukan seobyektif mungkin dan berusaha memberikan gambaran yang obyektif pula tentang kontribusi dana infak haji dan pemanfaatannya terhadap pembangunan daerah, khususnya pembangunan kegiatan keagamaan di Kabupaten Bone.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Usaha Kecil di Wisata Kuliner "Pantai Kering" Kota Watampone

Para pelaku usaha kecil membuka dan mengembangkan usahanya di Wisata Kuliner "Pantai Kering" tentu mendapatkan berbagai permasalahan atau kendala dalam mengelola usahanya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil sebagai berikut:

1. Modal kurang

Kekurangan modal merupakan kendala pertama dan utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil di Wisata Kuliner "Pantai Kering" untuk mengembangkan modal usaha. Seperti terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1

Kendala Modal

Kendala Modal	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Kurang	30	100
Cukup	0	0
Lebih dari cukup	0	0
Jumlah	30	100

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2012

Kekurangan modal merupakan persoalan mendasar bagi mereka dalam mengembangkan usahanya, karena melihat omzet penjualan yang mereka dapatkan cenderung naik. Namun demikian kendala modal tersebut mereka dapat atasi dengan mengajukan kredit ke bank atau pun di lembaga non bank seperti pegadaian, lebih jelasnya cara pelaku usaha kecil mengatasi kekurangan modal dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2

Cara Pelaku Usaha Kecil Mengatasi Kekurangan Modal

Cara Mengatasi Kurang Modal	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Kredit Bank	12	40
Gadai Barang	3	10
Pinjam Rentenir	0	0
Tidak mengajukan kredit	15	50
Jumlah	30	100

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2012

Informasi tabel 2 di atas menunjukkan bahwa hampir setengah pelaku usaha kecil di Wisata Kuliner "Pantai Kering" mengatasi kekurangan modal dengan mengajukan kredit di bank, dan 10% di antaranya mengatasinya dengan menggadaikan barang di lembaga pegadaian dan ada setengah dari jumlah pelaku usaha kecil tidak mampu mengajukan kredit.

Alasan mereka tidak mampu mengajukan kredit ke bank karena mereka tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan oleh bank, bagi mereka persyaratan dan bunga cicilan sangat berat yang mereka khawatirkan tidak sanggup untuk mengembalikan.

2. Harga bahan baku mengalami inflasi

Selain modal yang menjadi kendala para pelaku usaha kecil Wisata Kuliner "Pantai Kering", ketersediaan bahan baku juga menjadi kendala utama karena akan mempengaruhi kelancaran aktivitas usaha mereka, apalagi ketika harga bahan baku tersebut mengalami kenaikan atau inflasi tentu akan mempengaruhi harga jual. Berikut gambaran persoalan bahan baku yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Kondisi Harga Bahan Baku

Harga Bahan Baku	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Mahal	10	33,3
Murah	0	0
Fluktuatif	20	66,7
Jumlah	30	100

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2012

Tabel 3 di atas memberikan gambaran bahwa menurut para pelaku usaha kecil kondisi harga bahan baku tidak ada yang murah, sering mengalami fluktuasi atau harga tidak menentu, terkadang naik dan terkadang turun, bahkan yang paling parah kalau di saat tertentu harga mengalami inflasi.

Kondisi harga bahan baku seperti itu tentu merupakan kendala bagi para pelaku usaha kecil yang memiliki modal yang kecil dan juga ketika akan memasarkan barang dagangannya. Karena ketika menentukan harga jual tentunya akan menyesuaikan harga bahan baku. Namun demikian, mereka akan menghadapi persoalan lain, ketika harus menaikkan harga jual barang dagangan mereka, maka akan mempengaruhi omzet penjualan menjadi turun, sehingga mereka akan melakukan cara untuk mengatasinya dengan melakukan spekulasi dua cara, pertama dengan menaikkan harga jual dan kualitas barang tetap. Konsekwensinya omzet penjualan akan turun. Kedua harga jual tetap atau tidak dinaikkan tetapi kualitas barang diturunkan. Cara kedua ini yang paling banyak dipilih oleh para pelaku usaha kecil, karena resiko terhadap penurunan omzet penjualan marginnya kecil.

3. Kendala retribusi yang berat

Para pelaku usaha kecil yang beraktivitas di Wisata Kuliner "Pantai Kering" yang difasilitasi oleh pemerintah tentu tidak gratis, tetapi mereka dikenakan kewajiban membayar retribusi setiap hari. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka adanya retribusi yang harus mereka bayar setiap hari, sebagaimana dalam tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Kendala Restribusi

Kendala Restribusi	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Berat	26	86,7
Sedang	4	13,3
Ringan	0	0
Jumlah	30	100

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2012

Tabel 4 di atas memberikan informasi bahwa semua pelaku usaha kecil pungutan menyatakan bahwa restribusi yang mereka keluarkan sangat membebani usaha mereka, karena menurut mereka retribusi yang ditetapkan pemerintah tersebut setiap tahun mengalami kenaikan, sementara omzet penjualan mereka tidak mengalami kenaikan. Harapan mereka kewajiban retribusi tersebut jangan dinaikkan setiap tahun, tetapi paling tidak minimal sekali dalam 2 tahun dinaikkan.

Pola Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Wisata Kuliner "Pantai Kering"

Adapun pola pemberdayaan yang harus diupayakan oleh semua pihak, baik pemerintah, BUMN ataupun pihak lain sebagai berikut:

1. Fasilitas tempat yang tertata dengan baik dan menyenangkan baik bagi penjual maupun bagi pengunjung.

Sebagaimana telah digambarkan bahwa lokasi Wisata Kuliner "Pantai Kering" menjadi tempat para pelaku usaha beraktivitas sangat strategis, namun belum tertata dengan baik sebagai tempat wisata keluarga yang menyenangkan. Lebih jelasnya dapat dilihat pengakuan para pelaku usaha kecil pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5
Harapan Penataan fasilitas tempat usaha

Penataan fasilitas tempat usaha	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Ditata dengan baik	30	100
Kondisi sekarang	0	0
Tidak ada	0	0
Jumlah	30	100

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2012

Semua pelaku usaha kecil mengharapkan agar pemerintah dapat melakukan penataan terhadap tempat usaha mereka agar lebih nyaman dan menarik, sehingga pengunjung dapat lebih banyak mendatangi usaha mereka dan tentunya akan menambah omzet penjualan. Bahkan dapat menambah fasilitas umum, misalnya dengan membangun toilet umum yang tentunya sangat dibutuhkan oleh para pengunjung dan pengelolaan tempat parkir kendaraan pengunjung yang baik.

2. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dan produk usaha kecil

Salah satu faktor yang dapat menarik minat para pengunjung yang datang ke lokasi Wisata Kuliner "Pantai Kering" adalah semakin baiknya pelayanan dan mutu produk para usaha kecil yang beraktivitas di sana, namun demikian salah satu kendala bagi mereka kurangnya informasi dan pengetahuan tentang cara meningkatkan produk, sehingga menjadi keniscayaan bagi mereka untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tersebut melalui pendidikan dan latihan yang difasilitasi oleh pemerintah ataupun dari pihak lain.

Lebih jelasnya untuk mengetahui keinginan mereka mendapatkan pendidikan dan latihan terkait dengan peningkatan kualitas produk usahanya, dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6

Cara Peningkatan kualitas produk usaha

Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Penyuluhan	5	16,6
Pendidikan Latihan	25	83,7
Tidak ada	0	0
Jumlah	30	100

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2012

Seharusnya pemerintah dalam rangka memberdayakan para pelaku usaha kecil di Wisata Kuliner "Pantai Kering", minimal memberikan penyuluhan yang difasilitasi dinas terkait yaitu dinas perdagangan, bahkan dapat memfasilitasi dengan mengadakan pendidikan dan latihan tentang peningkatan kualitas produk usaha mereka. Karena sesungguhnya yang menjadi kelemahan bagi usaha kecil adalah kurang informasi dan pengetahuan terkait dengan peningkatan kualitas produksi. Seperti cara pengeolahan yang higienis, pengemasan dan pemasaran yang baik.

Walaupun sesungguhnya dengan melakukan peningkatan kualitas produk akan berdampak pada tingginya biaya produksi, dan berdampak pula akan mempengaruhi harga produksi. Namun demikian, bagi pelanggan tidak

memperdulikan harga yang terpenting kualitas produk barang tersebut tinggi.

3. Program bantuan modal yang mudah dan murah

Bagi para pelaku usaha kecil di Wisata Kuliner "Pantai Kering" program bantuan modal yang mudah dan murah yang diharapkan, sebagaimana informasi pada tabel 7 berikut:

Tabel 7

Program Bantuan Modal

Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Bantuan Modal yang Mudah dan Murah	20	67,7
CSR BUMN	10	33,3
Tidak ada	0	0
Jumlah	30	100

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2012

Harapan mereka tidak terlalu tinggi, dan tidak juga mengharapkan adanya bantuan cuma-cuma. Keinginan mereka pemerintah atau pihak lain dapat memberikan modal dengan persyaratan mudah dan pengembalian cicilan dengan mudah yang rendah dan terjangkau.

Beberapa tahun terakhir, sesungguhnya pemerintah telah memprogram bantuan kredit, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, walaupun klaim pemerintah bahwa kedua program tersebut berhasil memberdayakan para usaha kecil melalui modal. Namun menurut para pelaku usaha kecil program tersebut masih terlalu berat dan belum memuaskan. Lebih jelasnya dapat dilihat tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8

Persyaratan Program Bantuan Modal

Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Berat	30	100
Ringan	0	0
Biasa saja	0	0
Jumlah	30	100

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2012

Bagi pelaku usaha kecil, sesungguhnya program bantuan modal tersebut pengembalian bunganya sudah lumayan kecil dan terjangkau namun yang menjadi berat dan susah dipenuhi adalah pada persyaratan administrasinya. Misalnya program PNPM Mandiri harus berkelompok,

padahal besaran peminjaman tidak terlalu besar yaitu Rp. 5000.000 perkelompok, yang setiap kelompok berjumlah 4 (empat) orang berarti setiap pelaku usaha hanya mendapatkan Rp. 1.250.000. Jumlah tersebut tentu sangat sedikit dengan melihat kebutuhan modal bagi pelaku usaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya lebih besar lagi.

Lain halnya persoalan pada program Kredit Usaha Rakyat, menurut pelaku usaha kecil di Wisata Kuliner "Pantai Kering" yang paling berat persyaratan adanya agunan (jaminan) yang harus ada. Padahal rata-rata mereka adalah pendatang yang belum mempunyai tempat tinggal tetap, mereka masih banyak mengontrak rumah untuk tempat tinggal mereka. Sehingga persyaratan adanya agunan (jaminan) sangat berat bagi mereka, karena mereka belum memiliki sertifikat tanah atau bangunan. Lebih jelas dapat dilihat tabel 9 di bawah ini

Tabel 9

Persyaratan Administrasi yang Berat

Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
KTP	0	0
Bunga Cicilan	0	0
Agunan (Jaminan)	30	100
Jumlah	30	100

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2012

Apa yang menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari persyaratan adanya agunan (jaminan), seharusnya pemerintah dapat memperhatikan, apalagi target pemerintah merealisasikan dana KUR sangat besar. Adanya persyaratan agunan (jaminan) tersebut dapat dihilangkan, pemerintah harusnya pada masyarakatnya sendiri, terutama masyarakat miskin yang tidak berdaya ekonomi, akan kemampuan pengembalian kredit seperti yang dilakukan oleh Muhammad Yunus salah seorang tokoh penerima nobel dalam bidang ekonomi pada tahun 2006.

Menurut Yunus, masyarakat yang tidak berdaya ekonomi seharusnya diberi kredit, mereka pasti dapat mengembalikan, dengan dukungan sistem dan prosedur yang kondusif. Yunus mampu dan berhasil melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Bangladesh dengan program kredit, seperti KUR, tanpa ada persyaratan agunan (jaminan).¹²

¹² Lihat Tempo Interaktif, *Yunus dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. www.tempo.co.id. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2012.

Keberhasilan Yunus dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil, seharusnya memberi inspirasi dan membuka "mata" pemerintah agar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat tidak "setengah hati", tapi harus maksimal, agar masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha kecil tidak merasa berat dan susah untuk mendapatkan kredit yang murah dan mudah. Termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mensyaratkan harus ada agunan (jaminan), tetapi tentu dengan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Karena, semakin mudahnya para pelaku usaha kecil memanfaatkan program KUR, maka akan makin menciptakan iklim usaha dan akan meningkatkan pendapat masyarakat dan masyarakat akan semakin sejahtera. Seperti juga pada para pelaku usaha kecil di Wisata Kuliner "Pantai Kering" Kota Watampone, dengan membuka usaha di tempat tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Lebih jelasnya dapat dilihat tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10

Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi keluarga

Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat Meningkatkan	0	0
Cukup meningkat	30	100
Kurang meningkat	0	0
Jumlah	30	100

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2012

Terlepas berbagai kendala mereka hadapi, para pelaku usaha kecil dalam membuka usahanya di Wisata Kuliner "Pantai Kering" telah memperoleh manfaat dalam membuka usaha, walaupun tidak signifikan tetapi pendapatan yang mereka peroleh dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, bahkan pendapatan yang mereka peroleh dapat disisihkan ataupun disimpan untuk keperluan masa depan, seperti pendidikan anak, membangun rumah, memiliki kendaraan dan sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. ³ Permasalahan usaha kecil di Wisata Kuliner "Pantai Kering" yang klasik dan mendasar adalah pada susahnyanya menambah modal usaha, harga bahan baku mengalami inflasi dan adanya retribusi dan pungutan liar yang memberatkan usaha mereka.

2. Pola pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika yang dihadapi usaha kecil di Wisata Kuliner "Pantai Kering" adalah fasilitas tempat yang harus ditata dengan baik sehingga mampu menjadikan wisata keluarga yang nyaman dan menghibur, pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan untuk meningkatkan SDM dan kualitas produk dan adanya program bantuan modal yang mudah dan murah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Indonesia. www.bps.go.id.

Bebbington, Anthony. *Development is more than just growth, Development Outreach*. Volume two, number three, Summer 2000.

Chambers, J. K., *Sociolinguistic Theory: Linguistic Variation and Its Social Significance*, 2nd edition (Malden, MA: Blackwell Publishers, 2003)

Friedmann. *Empowement: The Politics of Alternative Development*. Cambridge Mass: Blackwell Publisher, 1992.

Ife, Jim. *Community Developmen: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Kadin Indonesia, *Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi*. Jakarta: Kadin Indonesia, 2009.

Mudrajat, Kuncoro. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Sumidiningrat, Gunawan. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Gramedia: Jakarta: 1998.

Suryana. *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba, 2003.

Tempo Interaktif, *Yunus dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. www.tempo.co.id. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2012.

Abd. Rasyid R, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat...*

Tim peneliti SMERU. *Buku I: Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997-2003.* Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2003.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Bab III Pasal 5.